

IMPACT OF VILLAGE FUNDS ON POVERTY AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH

**DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH**

¹Rasidin Karo Karo Sitepu, ²Mediana Pongsitanan, ³Nunung Ariyani, Fandi Rizki Rosyari

¹Staff Ahli Puskadaran DPD-RI dan Dosen Fakultas Pertanian UISU - Medan
makaro888@gmail.com

²Kepala Bidang Pusat Pengkajian Informasi Anggaran Pusat dan Daerah
Setjen Dewan Perwakilan Daerah – Republik Indonesia

³Tenaga Fungsional Peneliti pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Setjen DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a form of state recognition of villages, which aims to clarify the functions and authority of villages, and strengthen the position of villages and rural communities as the subject of development. To support the village's tasks and duties, in accordance with existing regulations, Law Number 6 of 2014 gives a mandate to the Government to allocate Village funds, which since 2015 have been allocated to the State Budget. The research objective is to determine the impact of village funds on poverty and regional economic growth. Using the fixed effect model with pooled data series 2015-2019. Village funds have a positive impact on regional economic growth and are statistically significant, and can reduce poverty but are not statistically significant. To provide a better impact on economic improvement in the village area, village assistance funds are directed towards financial activities and community empowerment.

Keywords: village funds, economic growth, poverty

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, yang bertujuan untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Untuk mendukung tugas dan tugas desa, sesuai dengan peraturan yang ada, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana Desa yang sejak tahun 2015 telah dialokasi pada APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menggunakan model fixed effect dengan pooled data series 2015-2019. Dana desa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan secara statistik signifikan, dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan tetapi tidak signifikan secara statistik. Untuk memberikan dampak yang lebih baik terhadap kinerja ekonomi di wilayah desa, sebaiknya dana desa diarahkan untuk kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: dana desa, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa

tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penggunaan dana desa diarahkan pemerintah untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah

menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa dalam APBN yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. APBN tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada APBN 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta, pada tahun 2018 Dana Desa masih anggarakan sebesar Rp60 triliun dan pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun. Besarnya anggaran dana desa tersebut diharapkan memberikan peran penting bagi kemajuan dan kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di daerah.

METODOLOGI

Spesifikasi Model

Model ekonometrika merupakan suatu pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat stochastic yang mencakup satu atau lebih peubah pengganggu Intriligator(1978), atau merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (explanatory variables) terhadap variabel endogen (dependent variables) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (magnitude and sign) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis secara apriori ekonomi dengan kata lain, model yang baik haruslah memenuhi kriteria teori ekonomi (theoretically meaningful), kriteria statistika dan kriteria ekonometrika. Untuk menggambarkan

bagaiman peranan transfer daerah dan dana desa terhadap kinerja daerah, maka abstraksi model fungsikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \log(POV_{it}) &= \alpha_i + \beta_1 \log(Growth_{it}) \\ &+ \beta_2 \log(DD_{it}) + u_{it} \\ \log(Growth_{it}) &= \alpha_i + \beta_1 \log(I_{it}) \\ &+ \beta_2 \log(DD_{it}) + v_{it} \end{aligned}$$

Dimana

$Growth_{it}$ = pertumbuhan ekonomi daerah i pada tahun ke t

C_{it} = tingkat konsumsi daerah i pada tahun ke t

I_{it} = tingkat investasi daerah i pada tahun ke t

u_{it}, v_{it} = error term

Subscript i melambangkan provinsi ke- i , dan variabel yang tidak mengandung subscript i berarti variabel diukur pada level nasional. Model inflasi diestimasi dengan pendekatan yaitu *pure pooled* model. Persamaan tersebut disusun dalam struktur model panel dan diterapkan di 34 provinsi pada periode pengamatan 2000-2018. Untuk menangkap *nature of behaviour* kenaikan harga pertumbuhan ekonomi, dan untuk mempermudah interpretasi model akan diformulasikan dalam *double logarithm*. Karena dalam data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtut waktu meliputi pertumbuhan, sedangkan data data silang diwakili oleh provinsi.

Prosedur dan Estimasi

Ada empat jenis yang umum untuk estimasi suatu model yaitu time series, Cross-section; panel data dan engineering data (Koutsoyiannis, 1977). Wooldridge (2006) membagi data menjadi empat kelompok dimulai dengan cross-section; time series; pooled cross-section dan Panel atau Longitudinal Data. Umumnya data yang tersedia dalam bentuk series, karena data tersebut bisa memperlihatkan hasil yang diperoleh/dicapai atas

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dalam kajian ini, data cross-section digabungkan dengan data runtun waktu dikenal dengan pooled cross-section. Provinsi mewakili dari cross-section dan series adalah tahun 2000 sampai dengan 2018. Kedua data digabungkan sehingga sampel penelitian menjadi lebih besar.

Batalgi (1995) menyatakan keuntungan penggunaan data panel adalah (1) Pengendalian untuk heterogenitas individu, (2) Memberikan informasi yang lebih besar tentang data, lebih bervariasi, kurang, (3) berhubungan antar variabel, lebih besar derajat kebebasan dan lebih efisien, (4) Lebih mampu mempelajari penyesuaian dinamis (dynamic of adjustment), (5) Lebih mampu mengidentifikasi dan mengukur, yang secara sederhana tidak dapat terdeteksi pada cross-section murni atau data runtun waktu, dan (6) Modelnya mengizinkan peneliti untuk membentuk dan menguji model perilaku yang lebih kompleks daripada data cross-section dan runtun waktu murni, dan (7) Data yang dikumpulkan umumnya pada level mikro. Sementara kelemahannya terutama terletak pada rentang waktu yang relatif pendek. Model umum matematis dari data panel (Gujarati, 2011) adalah:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Dimana $i = 1, 2, \dots, k$ dan $t = 1, 2, \dots, n$. Model (2) terlihat adanya subscript pada variabel tak bebas, variabel bebas dan suku kesalahan (*error terms*) dengan symbol it . i menyatakan cross-section data yang menyatakan observasi dimana jumlahnya sebanyak k dan t menyatakan waktu dengan jumlah sebanyak n . Persamaan tersebut dikenal dengan Pooled Data Model dan dapat diestimasi dengan menggunakan metode kwadrat terkecil (*ordinary least square*) atau Pooled OLS Regression. Pilihan yang mungkin dilakukan untuk teknik mengestimasi model data panel adalah

1. Model Pooled OLS – semua sampel observasi misalkan, perusahaan, dikumpulkan, menjadi satu dimana tindakan ini menghilangkan cross-section dan runtun waktu. Model ini sering juga disebut Model koefisien konstan (Constant Coefficient Model).
2. Model Efek Tetap Kuadrat Terkecil Variabel Boneka (Fixed Effects Least Squares Dummy Variable Model – LSDV) - semua data digabungkan tetapi diijinkannya cross-section memiliki peubah dummy.
3. Model Efek Tetap dalam kelompok (Fixed Effects Within-Group Model) – semua data digabungkan tetapi unit observasi (objek) mengekspresikan setiap peubah sebagai selisih dari rata-ratanya dan diestimasi menggunakan metoda kwadrat terkecil.
4. Model Efek Acak (Random Effects Model) – seperti model LSDV dimana setiap observasi memiliki nilai intersep dan diasumsikan diambil secara acak dari populasi yang lebih besar (Gujarati dan Porter, 2009).

Pengujian Pemilihan Model

Pengujian selalu dilakukan untuk pemilihan antara model Pooled, fixed effect dan random effect atau dikenal dengan istilah Pengujian Model. Pengujian Model Pooled dibandingkan dengan model fixed effect mempunyai hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model Pooled lebih baik dari fixed effect

H_1 : Model fixed effect lebih baik dari Model Pooled

Pengujian ini dikenal dengan pengujian Chow dimana Statistik uji nya mengikuti distribusi F sebagai berikut:

$$F = \frac{(R_{fe}^2 - R_{pol}^2) / (m - 1)}{(1 - R_{fe}^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana m adalah jumlah cross-section, n adalah jumlah seluruh observasi, dan k adalah jumlah parameter yang diestimasi. Jika statistic F lebih besar dari F tabel dimana numeratornya $(m-1)$ dan denominatornya $(n-k-1)$, maka H_0 ditolak yang menyatakan bahwa nilai intersep tidak sama sehingga model yang dipergunakan model fixed effect (FE). Selanjutnya, pemilihan antara model Pooled dengan Random Effect Model (RE) dilakukan dengan pengujian yang dikenal dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model Pooled lebih tepat dan sesuai dengan data

H_1 : Random Effect Model lebih tepat dan sesuai dengan data

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$LM = \sqrt{\frac{NT}{2(T-1)}} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}} - 1 \right\}$$

Uji statistik tersebut mengikuti Distribusi Normal (0,1), sehingga diperbandingkan dengan Z_α , bila nilai LM lebih besar dari nilai Z_α maka tolak H_0 sehingga penolakan H_0 menyatakan menerima RE yang sesuai. Selanjutnya, pemilihan FE dan RE perlu dilakukan pengujian dimana pengujiannya dikenal dengan pengujian *Hausman* yang mempunyai hipotesa sebagai berikut:

H_0 : RE yang paling sesuai

H_1 : FE yang paling sesuai

Adapun uji statistiknya sebagai berikut:

$$\chi_{df}^2 = \frac{(\beta_{RE} - \beta_{FE})^2}{\sigma_{RE-FE}}$$

Jika χ^2 observasi ini lebih tinggi dari χ^2_{tabel} dengan derajat kebebasannya jumlah variabel bebas, maka hipotesis nol ditolak yang menyatakan bahwa Fixed effect yang sesuai dipergunakan dalam model tersebut. Pemilihan FE dan RE ini juga dapat menggunakan kaidah sebagai berikut:

1. Jika T (jumlah periode waktu) sangat besar dan N (jumlah cross-section) sangat kecil maka sangat kecil perbedaan nilai parameter yang diestimasi dengan FE dan RE tetapi lebih disukai menggunakan FE.
2. Pada Panel Pendek (N besar dan T kecil) dan terjadi perbedaan yang cukup besar pada estimasi, lebih disukai (tepat) menggunakan FE.
3. N sangat besar dan T sangat kecil, dimana asumsi RE tetap ada maka FE lebih tepat sebagai estimator dibandingkan FE.
4. Jika komponen kesalahan individu ε_i dan salah satu peubah penjelas (regressor) berkorelasi maka estimasi dengan RE akan bias sehingga lebih tepat menggunakan FE model.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rentang waktu (*time series*) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 dengan harga konstan tahun dasar 2010. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi yang terkait yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Terkait lainnya. Perlu diketahui bahwa seluruh data yang dinyatakan dalam satuan mata uang menggunakan harga konstan tahun 2010. Data yang digunakan dalam persamaan meliputi (1) PDRB Pengeluaran provinsi harga konstan 2000 dan 2010, (2) PDRB Pengeluaran Provinsi harga berlaku; (3) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Beberapa variabel dalam unit uang, dikonstantir dengan menggunakan deflator atau indeks harga yang sesuai. Tujuan mengkonversi nilai rupiah adalah untuk memperoleh skala pengukuran yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga menggambarkan pergerakan angka fisik atau riil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional, yang diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal. TKDD berperan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (public service delivery) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), serta mengurangi kesenjangan fiskal antar-daerah. Dalam struktur Belanja Negara pada APBN, TKDD terdiri dari dua bagian besar, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan Dana Desa yang diberikan kepada desa melalui kabupaten/kota. Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, alokasi belanja Dana Desa senantiasa meningkat setiap tahun.

Kebijakan Dana Desa yang mulai diimplementasikan tahun 2015, telah memasuki tahun kelima pada tahun 2019. Pengalokasian Dana Desa dalam APBN yang meningkat dari Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp70,0 triliun (2019) merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa (Tabel 1). Total alokasi Dana Desa dalam APBN selama 5 tahun telah mencapai Rp257,75 triliun yang didistribusikan kepada hampir 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Porsi alokasi Dana Desa dalam APBN dari dan di luar dana TKD (on top) secara bertahap terus meningkat sebagaimana amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hingga mencapai 10 persen sesuai kemampuan

keuangan negara. Seiring dengan meningkatnya dana yang dikelola oleh desa, Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa, penguatan kapasitas SDM pada level desa, serta penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, pemda, kecamatan, hingga tingkat desa.

Formula distribusi Dana Desa yang digunakan pada tahun 2015 – 2017 dengan rasio Alokasi Dasar (AD): Alokasi Formula (AF) = 90:10 yang lebih menitikberatkan pemerataan, pada tahun 2018 telah dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan (fairness) dengan rasio AD: Alokasi Afirmasi (AA):AF = 77:3:20. Dalam AF juga dilakukan perubahan komposisi bobot Jumlah Penduduk (JP): Jumlah Penduduk Miskin (JPM): Luas Wilayah (LW): Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang semula komposisi bobotnya 25:35:10:30 berubah menjadi 10:50:15:25. Reformulasi distribusi Dana Desa tersebut diharapkan dapat memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengakomodasi kebijakan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN perlu dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa dengan meningkatkan porsi AF yang lebih besar agar distribusi Dana Desa makin berkeadilan.

Peningkatan belanja negara merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil estimasi (Lampiran 1) menunjukkan bahwa dana desa (DD) memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan artinya bahwa kenaikan dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan meskipun secara statistik tidak signifikan. Penelitian yang sama juga diperkuat oleh Harsin et al (2016) Sofianto (2017) dimana pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Kehika dan Mael 2017).

Tabel 1. Perkembangan Dana Desa Berdasarkan Provinsi Tahun 2015 – 2019

Code	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
_11	Aceh	1,707.82	3,829.75	4,892.57	4,457.51	4,955.50
_12	Sumatera Utara	1,461.16	3,293.28	4,197.97	3,874.86	4,452.05
_13	Sumatera Barat	267.00	598.64	796.54	790.79	932.33
_14	Riau	445.65	999.28	1,269.31	1,254.69	1,436.69
_15	Jambi	381.56	856.77	1,090.94	1,037.67	1,184.56
_16	Sumatera Selatan	775.04	1,780.77	2,267.26	2,309.39	2,683.95
_17	Bengkulu	362.96	813.90	1,035.34	945.64	1,079.42
_18	Lampung	684.73	1,536.76	1,957.49	2,091.40	2,427.11
_19	Kepulauan Bangka Belitung	91.93	206.29	261.66	264.57	309.83
_21	Kepulauan Riau	79.20	177.77	228.18	221.50	261.33
_31	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_32	Jawa Barat	1,589.71	3,568.44	4,547.51	4,823.10	5,710.07
_33	Jawa Tengah	2,228.89	5,002.43	6,384.44	6,737.08	7,889.43
_34	DI. Yogyakarta	128.08	287.70	368.57	361.89	423.79
_35	Jawa Timur	2,214.01	4,969.12	6,339.56	6,368.75	7,441.56
_36	Banten	352.52	791.25	1,009.51	937.18	1,092.07
_51	Bali	185.43	416.26	537.26	531.14	630.19
_52	Nusa Tenggara Barat	301.80	677.49	865.01	983.19	1,181.33
_53	Nusa Tenggara Timur	812.88	1,849.35	2,360.35	2,537.84	3,020.50
_61	Kalimantan Barat	537.07	1,241.61	1,616.73	1,688.28	1,992.57
_62	Kalimantan Tengah	403.35	904.37	1,148.90	1,144.59	1,347.14
_63	Kalimantan Selatan	501.12	1,125.24	1,430.38	1,316.57	1,506.34
_64	Kalimantan Timur	240.54	540.76	692.42	730.93	870.12
_65	Kalimantan Utara	129.87	291.10	369.94	387.69	463.27
_71	Sulawesi Utara	402.55	911.50	1,161.36	1,065.41	1,210.56
_72	Sulawesi Tengah	500.30	1,124.64	1,433.83	1,363.16	1,567.95
_73	Sulawesi Selatan	635.36	1,425.60	1,820.52	1,986.22	2,351.15
_74	Sulawesi Tenggara	496.08	1,126.87	1,482.03	1,411.24	1,613.82
_75	Gorontalo	179.96	403.68	513.96	540.59	636.61
_76	Sulawesi Barat	162.02	363.56	461.09	472.27	560.23
_81	Maluku	334.00	754.64	961.60	964.70	1,122.51
_82	Maluku Utara	291.07	653.46	832.41	785.61	891.60
_91	Papua Barat	449.33	1,074.69	1,364.41	4,284.84	1,516.92
_92	Papua	1,433.23	3,385.12	4,300.95	1,329.72	5,237.50
	Indonesia	20,766.20	46,982.08	60,000.00	60,000.00	70,000.00

Sumber: APBN 2015-2019

Berbeda dengan temuan Karimah F et al 2016 dimana hasil temuannya disebutkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana

desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tumbel

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

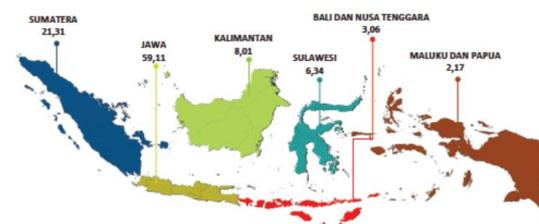
2014 yang menjelaskan bahwa faktor bantuan desa dan pembangunan desa memiliki hubungan yang signifikan.

Goma 2015 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa sertapengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa Bolangitang Satu. Secara umum peranan dana desa dalam menurun kemiskinan belum signifikan, peranan dana desa terlihat memiliki dampak mulai dari tahun 2018 dan 2019. Menurut Nihaya et al 2016 beberapa hal kemungkinan disebabkan oleh karena SDM yang masih rendah, regulasi atau aturan, anggaran atau dana desa yang belum sinkron, lemahnya partisipasi masyarakat dan akses masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Hasniati 2016 Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin

terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019 (BPS 2019).



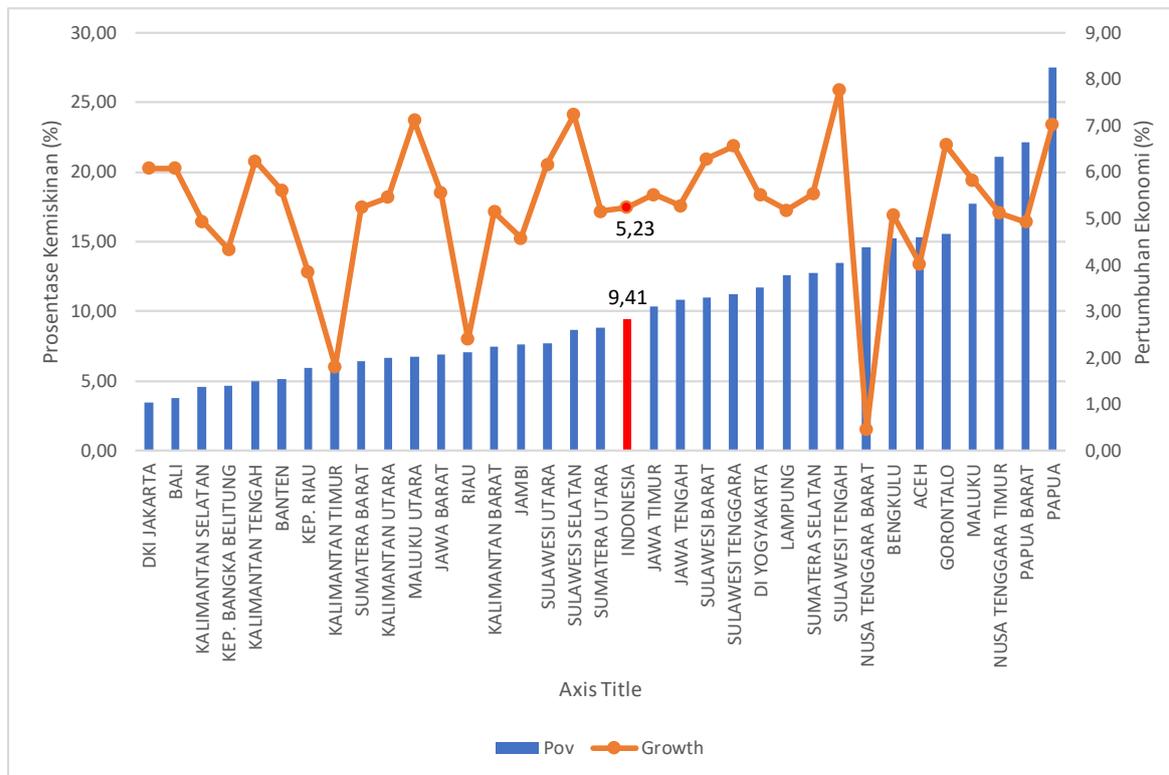
Gambar 1. Kontribusi Wilayah Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan II 2019 (persen)

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai Rp3 963,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2 735,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2019 dibanding triwulan II-2018 tumbuh 5,05 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 15,27 persen (BPS 2019).

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni

sebesar 59,11 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,31 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,76 persen (*y-on-y*). (Gambar 1).



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Tahun 2019

Jika dilihat berdasarkan unit wilayah provinsi bahwa terdapat kecenderungan dimana pertumbuhan yang tinggi maka tingkat kemiskinan relative rendah. Dua provinsi yang menarik untuk dilihat yaitu provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Riau dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dibawah nasional (5.23%) tetapi tingkat kemiskinannya juga dibawah nasional (9.41%). Sementara provinsi Nusa Tenggara Barat dimana tingkat kemiskinannya diatas nasional dan pertumbuhan ekonominya juga di bawah nasional. Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tinggi tetapi kemiskinan masih diatas nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep *trickle-down effect* tidak berlaku bagi wilayah

provinsi tersebut. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa tidak semua wilayah ketika pertumbuhannya meningkat tidak berlawanan dengan penurunan tingkat kesmiskinan (Lampiran 1). Hasil estimasi (Lampiran 2) menunjukkan bahwa tingkat investasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah tetapi tidak signifikan secara statistik. Sementara dana desa (DD) juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dari secara statistik signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen.

Trickle-down effect menjelaskan dimana perkembangan atau kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata,

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

artinya bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk pemilik modal ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya melalui mekanisme pasar yang ada sehingga berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dana Desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Meskipun peranan dana desa terlihat tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Tidak semua wilayah provinsi ketika pertumbuhannya meningkat tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, artinya bahwa *trickle-down effect* tidak berlaku bagi wilayah provinsi tersebut seperti Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tingkat investasi dan dana desa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan antara lain melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat desa yang dapat meningkatkan perekonomian desa serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa pada program/kegiatan pembangunan desa untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Harsin A, Zulkarnaen, Listiani EI. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Program*

Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.

- BPS, 2019. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2019. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Jakarta: (ID). Indonesia
- BPS, 2019. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Jakarta: (ID). Indonesia
- Goma S. 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. 2(6).1-14
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. 2(1): 15-30.
- Hendrizul. 2017. Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa" *Jurnal Akuntansi Syariah*. 1(2): 287-299.
- Karimah F, Saleh C, Wanusmawatie I. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*: 2(4) 597-602.
- Nihaya U, Prihatin ES, Herawati R. 2016. Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Diponegoro Law Review*. 5(2): 1-15.
- Sofianto A. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*: 1(1) 23-32.
- Tumbel TM. 2014. Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran

- Kabupaten Minahasa Selatan).
Jurnal LPPM Bidang
EkoSosBudKum, 1(2):1-12.
- Kehika BS, Mael MY. 2017. Analisis
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam Peningkatan Perekonomian
Masyarakat Petani di Desa
Usapinot. AGRIMOR: Jurnal
Agribisnis Lahan Kering. 2(4): 59-
62.
- Farlina W, Hartono Y. 2019. Analysis of
Factors That Influence On
Reporting Of Dana Desa
Programs. e-Jurnal Apresiasi
Ekonomi. 7(2): 192 -201.

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

Lampiran 1: Hasil Estimasi Persamaan Kemiskinan

Dependent Variable: LOG(POV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 08/20/19 Time: 13:03

Sample (adjusted): 2015 2019

Included observations: 5 after adjustments

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 161

Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.035924	1.181933	2.568609	0.0128
_11--LOG(GROWTH_11)	0.109635	0.198695	0.551776	0.5832
_12--LOG(GROWTH_12)	-2.469399	2.906242	-0.849688	0.3990
_13--LOG(GROWTH_13)	-0.053151	0.750418	-0.070828	0.9438
_14--LOG(GROWTH_14)	-0.014692	0.020284	-0.724319	0.4718
_15--LOG(GROWTH_15)	-0.213820	0.446133	-0.479274	0.6335
_16--LOG(GROWTH_16)	-0.011361	0.167441	-0.067853	0.9461
_17--LOG(GROWTH_17)	0.686468	0.875873	0.783753	0.4364
_18--LOG(GROWTH_18)	0.123661	2.347436	0.052679	0.9582
_19--LOG(GROWTH_19)	0.546804	0.453674	1.205279	0.2330
_21--LOG(GROWTH_21)	-0.048831	0.055614	-0.878030	0.3836
_32--LOG(GROWTH_32)	-1.003720	0.451898	-2.221122	0.0303
_33--LOG(GROWTH_33)	0.649462	1.696955	0.382722	0.7033
_34--LOG(GROWTH_34)	-0.435802	0.237087	-1.838149	0.0712
_35--LOG(GROWTH_35)	-0.494193	2.206304	-0.223992	0.8236
_36--LOG(GROWTH_36)	0.167261	0.535606	0.312283	0.7559
_51--LOG(GROWTH_51)	-0.510978	0.413229	-1.236549	0.2212
_52--LOG(GROWTH_52)	-0.004466	0.017002	-0.262659	0.7937
_53--LOG(GROWTH_53)	0.823140	1.268607	0.648854	0.5190
_61--LOG(GROWTH_61)	0.586075	1.125947	0.520518	0.6047
_62--LOG(GROWTH_62)	0.213726	0.252555	0.846254	0.4009
_63--LOG(GROWTH_63)	-0.000624	0.160865	-0.003880	0.9969
_64--LOG(GROWTH_64)	-0.059029	0.104022	-0.567466	0.5726
_65--LOG(GROWTH_65)	0.337927	0.065379	5.168754	0.0000
_71--LOG(GROWTH_71)	-0.179694	2.033220	-0.088379	0.9299
_72--LOG(GROWTH_72)	-0.041902	0.057265	-0.731722	0.4673
_73--LOG(GROWTH_73)	-1.209840	1.337749	-0.904385	0.3695
_74--LOG(GROWTH_74)	0.299685	0.719978	0.416241	0.6788
_75--LOG(GROWTH_75)	0.476427	0.889145	0.535826	0.5941
_76--LOG(GROWTH_76)	0.028375	0.269972	0.105103	0.9167
_81--LOG(GROWTH_81)	0.257763	0.651366	0.395727	0.6938
_82--LOG(GROWTH_82)	0.245102	0.147097	1.666253	0.1011
_91--LOG(GROWTH_91)	-0.112882	0.136962	-0.824187	0.4132
_92--LOG(GROWTH_92)	0.020287	0.081684	0.248366	0.8047
_11--LOG(DD_11)	-0.009760	0.045337	-0.215278	0.8303
_12--LOG(DD_12)	-0.011646	0.049530	-0.235134	0.8149
_13--LOG(DD_13)	-0.032396	0.068352	-0.473960	0.6373
_14--LOG(DD_14)	-0.025089	0.063170	-0.397170	0.6927
_15--LOG(DD_15)	-0.029924	0.052402	-0.571043	0.5702
_16--LOG(DD_16)	-0.025832	0.064004	-0.403600	0.6880
_17--LOG(DD_17)	-0.015343	0.048058	-0.319257	0.7507
_18--LOG(DD_18)	-0.026969	0.067351	-0.400423	0.6903
_19--LOG(DD_19)	-0.073561	0.069300	-1.061486	0.2929
_21--LOG(DD_21)	-0.056776	0.065359	-0.868679	0.3886
_32--LOG(DD_32)	-0.039610	0.075160	-0.527013	0.6002
_33--LOG(DD_33)	-0.017181	0.083759	-0.205127	0.8382

_34--LOG(DD_34)	-0.080378	0.070161	-1.145626	0.2567
_35--LOG(DD_35)	-0.029459	0.065898	-0.447039	0.6565
_36--LOG(DD_36)	-0.029851	0.057932	-0.515287	0.6083
_51--LOG(DD_51)	-0.074399	0.067066	-1.109332	0.2719
_52--LOG(DD_52)	-0.059650	0.083335	-0.715788	0.4770
_53--LOG(DD_53)	-0.025278	0.071489	-0.353591	0.7249
_61--LOG(DD_61)	-0.038481	0.076127	-0.505482	0.6151
_62--LOG(DD_62)	-0.045350	0.063253	-0.716964	0.4763
_63--LOG(DD_63)	-0.012159	0.045835	-0.265270	0.7917
_64--LOG(DD_64)	-0.030589	0.069266	-0.441624	0.6604
_65--LOG(DD_65)	-0.038390	0.071013	-0.540599	0.5909
_71--LOG(DD_71)	-0.019791	0.074070	-0.267189	0.7903
_72--LOG(DD_72)	-0.028064	0.053338	-0.526159	0.6008
_73--LOG(DD_73)	0.002536	0.068987	0.036758	0.9708
_74--LOG(DD_74)	-0.009114	0.054307	-0.167824	0.8673
_75--LOG(DD_75)	-0.055145	0.070204	-0.785486	0.4354
_76--LOG(DD_76)	-0.035758	0.066137	-0.540675	0.5908
_81--LOG(DD_81)	-0.026743	0.063270	-0.422679	0.6741
_82--LOG(DD_82)	-0.025245	0.054664	-0.461821	0.6459
_91--LOG(DD_91)	-0.028843	0.061554	-0.468577	0.6411
_92--LOG(DD_92)	-0.010305	0.060275	-0.170968	0.8648
Fixed Effects (Cross)				
_11--C	-0.179020			
_12--C	3.543818			
_13--C	-0.373877			
_14--C	-0.474289			
_15--C	-0.008082			
_16--C	0.113003			
_17--C	-1.045975			
_18--C	-0.064247			
_19--C	-0.805521			
_21--C	-0.101285			
_32--C	1.639181			
_33--C	-1.227493			
_34--C	1.807574			
_35--C	0.896692			
_36--C	-1.033137			
_51--C	0.777472			
_52--C	0.938448			
_53--C	-0.757344			
_61--C	-1.137517			
_62--C	-0.820507			
_63--C	-1.233190			
_64--C	-0.541189			
_65--C	-0.932420			
_71--C	-0.215850			
_72--C	0.279125			
_73--C	1.520292			
_74--C	-0.908544			
_75--C	-0.005853			
_76--C	0.051966			
_81--C	-0.025917			
_82--C	-1.120575			
_91--C	0.917723			
_92--C	0.477163			
Fixed Effects (Period)				
2015--C	0.045950			
2016--C	0.043037			
2017--C	0.018221			
2018--C	-0.058859			
2019--C	-0.048348			

Impact of Village Funds on Poverty and Regional Economic Growth

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Period fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997928	Mean dependent var	2.311310
Adjusted R-squared	0.994283	S.D. dependent var	0.499167
S.E. of regression	0.037741	Akaike info criterion	-3.457583
Sum squared resid	0.082615	Schwarz criterion	-1.486250
Log likelihood	381.3355	Hannan-Quinn criter.	-2.657142
F-statistic	273.8284	Durbin-Watson stat	1.378462
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2: Hasil Estimasi Persamaan Pertumbuhan

Dependent Variable: LOG(GROWTH?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/20/19 Time: 13:19
 Sample (adjusted): 2016 2019
 Included observations: 4 after adjustments
 Cross-sections included: 33
 Total pool (unbalanced) observations: 130
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.829481	10.68901	-0.451818	0.6530
_11--LOG(INV_11)	0.551688	1.005994	0.548401	0.5855
_12--LOG(INV_12)	0.504945	0.893675	0.565020	0.5742
_13--LOG(INV_13)	0.537764	0.994575	0.540697	0.5907
_14--LOG(INV_14)	0.429321	0.896564	0.478851	0.6338
_15--LOG(INV_15)	0.568560	1.032651	0.550583	0.5840
_16--LOG(INV_16)	0.509384	0.922377	0.552251	0.5828
_17--LOG(INV_17)	0.613420	1.084011	0.565880	0.5736
_18--LOG(INV_18)	0.510234	0.951040	0.536500	0.5936
_19--LOG(INV_19)	0.598857	1.141307	0.524712	0.6017
_21--LOG(INV_21)	0.497399	0.962055	0.517017	0.6070
_32--LOG(INV_32)	0.446554	0.831698	0.536919	0.5933
_33--LOG(INV_33)	0.456513	0.852774	0.535327	0.5944
_34--LOG(INV_34)	0.570806	1.047603	0.544869	0.5879
_35--LOG(INV_35)	0.453757	0.823089	0.551285	0.5835
_36--LOG(INV_36)	0.514461	0.908573	0.566230	0.5733
_51--LOG(INV_51)	0.553724	0.990374	0.559106	0.5782
_52--LOG(INV_52)	0.197521	1.038294	0.190236	0.8498
_53--LOG(INV_53)	0.550640	1.029190	0.535022	0.5946
_61--LOG(INV_61)	0.541950	1.009162	0.537030	0.5932
_62--LOG(INV_62)	0.571402	1.011044	0.565160	0.5741
_63--LOG(INV_63)	0.588252	1.044664	0.563101	0.5755
_64--LOG(INV_64)	0.436870	0.917249	0.476284	0.6356
_65--LOG(INV_65)	0.591870	1.093922	0.541053	0.5905
_71--LOG(INV_71)	0.594680	1.036802	0.573571	0.5684
_72--LOG(INV_72)	0.594014	0.998353	0.594994	0.5541
_73--LOG(INV_73)	0.514131	0.917082	0.560616	0.5771
_74--LOG(INV_74)	0.591923	1.018435	0.581209	0.5633

_75--LOG(INV_75)	0.667720	1.181304	0.565239	0.5740
_76--LOG(INV_76)	0.661978	1.177606	0.562139	0.5761
_81--LOG(INV_81)	0.655681	1.172772	0.559086	0.5782
_82--LOG(INV_82)	0.709793	1.199683	0.591650	0.5563
_91--LOG(INV_91)	0.623376	1.133407	0.550002	0.5844
_92--LOG(INV_92)	0.574411	1.004108	0.572060	0.5694
_11--D(LOG(DD_11))	1.244815	0.413026	3.013889	0.0038
_12--D(LOG(DD_12))	1.472132	0.471256	3.123845	0.0027
_13--D(LOG(DD_13))	2.184455	0.698443	3.127606	0.0027
_14--D(LOG(DD_14))	1.919782	0.617325	3.109838	0.0029
_15--D(LOG(DD_15))	1.559914	0.504893	3.089595	0.0030
_16--D(LOG(DD_16))	1.976344	0.646589	3.056568	0.0033
_17--D(LOG(DD_17))	1.413109	0.450579	3.136209	0.0027
_18--D(LOG(DD_18))	2.271767	0.730795	3.108624	0.0029
_19--D(LOG(DD_19))	2.198383	0.709779	3.097277	0.0030
_21--D(LOG(DD_21))	1.920550	0.624625	3.074727	0.0032
_32--D(LOG(DD_32))	2.442481	0.786408	3.105869	0.0029
_33--D(LOG(DD_33))	2.375008	0.761822	3.117536	0.0028
_34--D(LOG(DD_34))	2.295499	0.757013	3.032312	0.0036
_35--D(LOG(DD_35))	2.050440	0.657437	3.118838	0.0028
_36--D(LOG(DD_36))	1.697093	0.548372	3.094783	0.0030
_51--D(LOG(DD_51))	2.079202	0.670066	3.102981	0.0029
_52--D(LOG(DD_52))	4.788623	1.012876	4.727750	0.0000
_53--D(LOG(DD_53))	2.207061	0.705993	3.126181	0.0027
_61--D(LOG(DD_61))	2.149070	0.687422	3.126276	0.0027
_62--D(LOG(DD_62))	1.972103	0.621985	3.170663	0.0024
_63--D(LOG(DD_63))	1.397297	0.451698	3.093429	0.0030
_64--D(LOG(DD_64))	1.937241	0.659028	2.939542	0.0047
_65--D(LOG(DD_65))	2.183814	0.733371	2.977774	0.0042
_71--D(LOG(DD_71))	1.799850	0.574457	3.133133	0.0027
_72--D(LOG(DD_72))	1.698207	0.519519	3.268808	0.0018
_73--D(LOG(DD_73))	2.425157	0.773943	3.133507	0.0027
_74--D(LOG(DD_74))	1.615773	0.516142	3.130483	0.0027
_75--D(LOG(DD_75))	2.060373	0.659908	3.122213	0.0028
_76--D(LOG(DD_76))	2.058733	0.659479	3.121754	0.0028
_81--D(LOG(DD_81))	1.967052	0.632076	3.112049	0.0028
_82--D(LOG(DD_82))	1.579749	0.518321	3.047817	0.0034
_91--D(LOG(DD_91))	1.664541	0.562357	2.959935	0.0044
_92--D(LOG(DD_92))	1.899958	0.603600	3.147713	0.0026
Fixed Effects (Period)				
2016--C	-0.889926			
2017--C	0.113236			
2018--C	3.462573			
2019--C	-2.607925			

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.790879	Mean dependent var	1.616674
Adjusted R-squared	0.550390	S.D. dependent var	0.477802
S.E. of regression	0.320380	Akaike info criterion	0.865117
Sum squared resid	6.158610	Schwarz criterion	2.409174
Log likelihood	13.76741	Hannan-Quinn criter.	1.492519
F-statistic	3.288631	Durbin-Watson stat	2.027076
Prob(F-statistic)	0.000003		
